

**KETIMPANGAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA TENAGA PENDIDIK DAERAH
PERBATASAN DI KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015-2016**

Oleh: Kamisah

Email : KamisahKamisah96@yahoo.com

Pembimbing : Dr.Khairul Anwar, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research would like to see what are the Authority of Education Department and Regional Personnel Agency and Programs in Inequality Distribution of Resource of Border Area Educator in Kecamatan Rangsang Pesisir Regency of Kepulauan Meranti in 2015-2016. The main problem that became the phenomenon in this research is to see in Meranti Islands Regency one of them in Rangsang Pesisir Subdistrict in the unequal distribution of educator resource become problems that often happen like, supporting facilities and infrastructure for student learning that is not berkualitas, lack of accessibility in economy, and lack of society in adaptation. The purpose of this study is first to describe the authority of the Department of Education and Regional Personnel Agency in Resolving or Distributing Inequality of Border Area Educational Personnel in Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti Islands, secondly to describe the educational equity program, Secondary Education Program, Education Quality Improvement Program and Teachers, Primary and Secondary Education Programs by the Department of Education and Regional Personnel Board in Kepulauan Meranti District in 2015-2016. The type of this research used is the type of descriptive research with qualitative analysis method. Technique of data collecting done by observation, interview and documentation. While data analysis is done with with qualitative analysis.

The results of this study indicate that the Authority and the Program of Education and Regional Personnel Board in distributing the resources of educators of border areas in the District of Rangsang Pesisir of Kepulauan Meranti Regency in 2015-2016, has not been able to perform well, so in the equity Senior High School educators have been taken by the Province in 2017. It is hoped that in the future it is necessary to affirm the policy of local government and related institutions in advancing education in the future.

Keywords: *Inequality, Resource Distribution of Teachers*

Pendahuluan

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan yang di kelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisiensi (berdaya guna dan berhasil guna) akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV, yang berbunyi: *"untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kedalam sebuah bentuk penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pendidikan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan akan kebutuhan global."*

Seorang pemerhati pendidikan Prof. Eko Budihardjo, ironi yang justru terjadi dengan pendidikan di negara yang begitu luas ini adalah pendidikan yang tidak meluas merata ke seluruh penjuru nusantara. Di era pembangunan yang sedang gencar-gencarnya ini, kesenjangan masih dirasakan oleh wilayah-wilayah Indonesia yang berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Bukan hanya antar daerah, tetapi antar kota pun terdapat kesenjangan pendidikan yang sebenarnya juga terlihat timpang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan: Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan Ibu Kotanya Selat Panjang. Rangsang Pesisir Merupakan Kecamatan termuda Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dimekarkan pada tahun 2012. Dalam pemerintah oleh Idris Sudin, S.Pd. dengan jumlah 11 Desa, yaitu Desa Sonde, Sokop, Beting, Kayu Ara, Tanah Merah, Sendaur, Kedabu Rapat, Telesung, Bungur, Tenggayun Raya dan Tanjung kedabu. Letak ibu kotanya di Desa Sonde.

Tepatnya diwilayah Sungai Rangsang, karena sudah memenuhi kriteria sebagai pusat Kecamatan. Letak yang geografis dan mempunyai peradaban sejarah bahwa sungai tersebut adalah satu-satunya sungai asal muasal yang ada di pulau Rangsang bagian Pesisir yang perbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan Rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada ayat (2) yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;

- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dikawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan kawasan Perbatasan antara Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Pendidikan menjadi hal yang paling sering menjadi sorotan, karena lewat pendidikanlah sesuatu perubahan dimulai. Penciptaan generasi muda yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat melakukan pembangunan di segala bidang merupakan alasan umum pendidikan menjadi begitu penting.

Terutama masalah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti salah satunya di Kecamatan Rangsang Pesisir dalam ketimpangan distribusi sumber daya tenaga pendidik menjadi permasalahan yang sering terjadi seperti, sumber daya manusia yang rendah, kekurangan tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Rangsang Pesisir itu didirikan pada tahun 2007 sampai sekarang, sarana dan prasarana penunjang untuk pembelajaran siswa yang tidak berkualitas, minimnya aksesibilitas dalam ekonomi, dan kurangnya masyarakat dalam beradaptasi. Sehingga sekolah tersebut tidak bisa maju dalam pendidikan jika dibandingkan Dengan sekolah yang lain.

Di bidang ekonomi ancaman itu terlihat dari pendapatan masyarakat yang relatif rendah, minimnya infrastruktur sosial ekonomi, karena kegiatan yang ada hanya berskala lokal, bersifat parsial dan kurang terkoordinasi berimplikasi pada rendahnya mutu pembangunan dan manusia. Untuk itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi dengan membuat kegiatan yang tidak hanya berskala lokal. Kemudian meningkatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan usaha masyarakat diwilayah perbatasan.

Ketimpangan ini timbul akibat tidak meratanya penyebaran pembangunan ekonomi. Adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi antar daerah menyebabkan daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama memiliki barang modal akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya.

Di bidang pemerintahan, ancaman terlihat dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk urusan kewenangan yang dimiliki oleh wilayah perbatasan. Tindak lanjut dari masalah ini adalah mengalokasikan dana yang optimal untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan serta memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah dan wilayah perbatasan sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat langsung ditangani secara tuntas oleh daerah.

Di bidang sosial budaya dan sumber daya manusia, ancaman terlihat dari minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kurangnya tenaga pendidik di wilayah perbatasan. Kemudian rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Ada juga ancaman berupa rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.

Kepala Sekolah beserta Komite Sekolah mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan agar penempatan guru sesuai dengan bidangnya, karena untuk memajukan pendidikan dan minat belajar siswa sangat dibutuhkan guru

yang profesional seharusnya Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan memperhatikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Rangsang Pesisir, perlu ada kerjasama yang maksimal antara pemerintah daerah setempat dan instansi terkait.

Diharapkan ada langkah selektif untuk menyebarkan guru secara merata. Dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang bisa mendukung proses belajar mengajar bagi kebutuhan siswa, agar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Rangsang Pesisir Bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dalam proses belajar mengajar.

Tabel.1.1.

Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, di Kecamatan Rangsang Pesisir tahun 2015

	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Guru dan Murid
TK	10	262	39	1: 20
SD	16	2.151	169	1: 27
SLTP	6	641	68	1:27
SMU	4	438	70	1:30

Sumber :BPS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 – 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang Pesisir, pada tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Pesisir terdapat sebanyak 10 Taman Kanak-Kanak (TK), 16 Sekolah Dasar (SD), 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan untuk Madrasah, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Pesisir memiliki 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 18 orang guru dan 72 murid, 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan 41 orang guru dan 224 orang murid, 2 Madrasah Aliyah (MA) dengan 16 orang guru dan 52 orang murid, dan 17 Madrasah Diniyah

Awaliyah dengan 111 orang guru dan 843 murid.

Berdasarkan keadaan yang terdapat diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ **Ketimpangan Distribusi Sumber Daya Tenaga Pendidik Daerah Perbatasan di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015-2016**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pertimbangan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan pertanyaan pokok yaitu :

1. Apa saja kewenangan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja Program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah dalam Ketimpangan Distribusi Sumber Daya Tenaga Pendidik Daerah Perbatasan di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015-2016?

Kerangka Teori

1. Teori Ketergantungan dan Keterbelakangan

Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut Negara Dunia Ketiga. Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara–negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara–negara lain, di mana negara–negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

Dalam hubungan negara maju dan negara tertinggal terjadi hubungan yang tidak seimbang. Ketimpangan hubungan yang tidak sejajar ini menyebabkan negara tertinggal tidak dapat berkembang kearah maju. Model pembangunan menurut teori ketergantungan adalah memaksimalkan faktor-faktor internal yang disebut dalam teori modernisasi sebagai penghambat gerak pembangunan. Justru menurut teori ketergantungan bahwa penyebab masalah pembangunan di beberapa negara dunia ketiga adalah faktor eksternal, yakni hubungan yang tidak sejajar diantara negara maju dan negara tertinggal ataupun intervensi dari negara maju terhadap negara tertinggal.

Tokoh utama dari teori dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut . Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, dampak positif dan negatif berkembangnya pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara.

Dos Santos mengklasifikasi ketergantungan dalam tiga jenis.

a. Ketergantungan Kolonial

(*Colonial dependence*)

b. Ketergantungan industri keuangan (*Industrial-financial dependence*)

c. Ketergantungan teknologi industri (*Technological-Industrial Dependence*)

Dilihat dari sisinya, yang menjadi teori ketergantungan semuanya adalah: yang menjadi hambatan pembangunan adalah bukanlah ketiadaan modal, melainkan pembagian kerja internasional yang terjadi, dengan demikian yang menjadi faktor-faktor keterbelakangan adalah faktor internal. Dan juga pembagian kerja internasional ini diuraikan menjadi antara dua kawasan, yakni pusat dan pinggiran. Terjadi pengalihan surplus dari negara pinggiran kepusat.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan didalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen dan video rekaman) dan biasanya diproses sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika dalam sebagai alat bantu analisis.

HASIL PENELITIAN Kewenangan dan Program Dinas

Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Ketimpangan Distribusi Sumber Daya Tenaga Pendidik Daerah Perbatasan di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015-2016

3.1. Kewenangan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pendidikan yang berkualitas merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua lembaga pendidikan mulai dari level sekolah sampai Perguruan Tinggi. Praktisi dibidang pendidikan secara terus menerus berusaha mengembangkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia sekaligus berusaha menyiapkan daya Pengelola Pendidikan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 20 Tahun 2012 Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok dan Fungsi :

1. Melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan didukung oleh Struktur Organisasi dan digambarkan sebagai berikut:

3.1.1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - b. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
4. Sub Bagian Keuangan;
5. Sub Bagian Administrasi Umum.
6. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
7. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama.
2. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
1. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Fisik;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.

2. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman;
4. UPTD;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengelolaan Pendidikan yang baik dan berkualitas membawa konsekuensi penyediaan dana yang cukup, baik dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah maupun kontribusi dari masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan .

Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan bidang Pendidikan di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pendidikan, lembaga yang terkait yaitu, Lembaga Dinas Pendidikan dan Lembaga Badan Kepegawaian Daerah.

Usaha-usaha pemerintah daerah dalam Distribusi Sumber Daya Tenaga Pendidik Daerah Perbatasan di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015-2016 yaitu:

1. Pengangkatan tenaga honorer daerah
2. Kualitas guru
3. Menyediakan fasilitas
4. Tunjangan
5. Motivasi intensif
6. Menyediakan sarana dan prasarana

3.1.2. Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok dan Fungsi :

1. Penyiapan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dibidang Kepegawaian sesuai dengan Norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah
2. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian
3. Penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kepegawaian
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan
5. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan
6. Penyiapan dan penetapan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan
7. Penyiapan dan penetapan gaji tunjangan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

- Perundang-Undangan
- 8. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil
- 9. Pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- 10. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah ke BKN

- b. Ka. Sub. Bagian Umum
- c. Ka. Sub. Bagian Keuangan
- 3. Kepala Bidang Data
 - a. Ka. Sub. Bidang Data dan informasi kepegawaian
 - b. Ka. Sub. Bidang Perencanaan kepegawaian
- 4. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
 - a. Ka. Sub. Bidang Karier
 - b. Ka. Sub. Bidang Disiplin Pegawai
- 5. Kepala Bidang mutasi pegawai
 - a. Ka. Sub. Bidang mutasi struktural dan fungsional
 - b. Ka. Sub. Bidang pemberhentian dan pensiun
- 6. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan kesejahteraan pegawai
 - a. Ka. sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Ka. sub. Bidang kesejahteraan Pegawai

3.1.3. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat
 - a. Sub Bag Program
 - b. Sub Bag Umum
 - c. Sub Bag Keuangan
- 3. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai
 - a. Sub Bidang Data dan informasi kepegawaian
 - b. Sub Bidang Perencanaan pegawai
- 4. Bidang Pengembangan pegawai
 - a. Sub Bidang Karier
 - b. Sub Bidang Disiplin Pegawai
- 5. Bidang Mutasi Pegawai
 - a. Sub Bidang mutasi struktural dan fungsional
 - b. Sub Bidang Pemberhentian dan pensiun
- 6. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Adapun Pejabat Struktural di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian.
- 2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah.
 - a. Ka. Sub. Bagian Program

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- (1). Kejelasan tujuan yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi;
 - (2). Pelaksanaan dilakukan secara objektif;
 - (3). Dilakukan oleh Tim yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam konteks evaluasi;
 - (4). Dilakukan secara transparan, sehingga hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders;
 - (5). Melibatkan berbagai pihak yang dipandang berkepentingan secara proaktif (*partisipatif*);
 - (6). Pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal (*akuntabel*);

- (7). Menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (*komprehensif*);
- (8). Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara tepat;
- (9). Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- (10). Berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tiga tema kebijakan Depdiknas;
- (11). Efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya terbatas dan sesuai dengan perencanaan.

Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mendistribusi Sumber Daya Tenaga Pendidik Daerah Perbatasan yaitu:

1. Badan Kepegawaian Daerah mengkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa ada penumpukan Tenaga Pendidik dari Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah monitoring sesuai usulan dari Dinas Pendidikan
3. Badan Kepegawaian Daerah mengevaluasi jika sudah Dinas Pendidikan mengeluarkan dalam bentuk SK.

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

3.2.1 Kebijakan Dan Program

Dalam upaya mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan ada beberapa kebijakan yang perlu diambil, agar pencapaian kegiatan dan program kerja lebih terarah. Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

2. Melengkapi kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
3. Meningkatkan kemampuan dan kualifikasi tenaga pendidik dan non kependidikan. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini dirumuskan dari dokumen Rencana Strategis yang telah ada.
2. Penetapan Program Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir: RS (Rencana Strategis) diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Kegiatan Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten

Kepulauan Meranti menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah yang didanai dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBD Tahun 2015, yang dilengkapi dengan identifikasi atas indikator kinerja kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

3.2.2. Rencana Anggaran Tahun 2015 -2016

Pada tahun anggaran 2015-2016, penyediaan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp.117.904.910.660,00,-. Anggaran tersebut diperuntukkan melaksanakan 12 program dan 332 kegiatan yang mendukung Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Indikator Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2015-2016.

Dalam tahun 2015-2016 telah dilaksanakan 332 kegiatan dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan APBN Tahun 2016. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasikan seluruh sasaran yang ditargetkan pada tahun 2015-2016.

Dalam Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) diuraikan kinerja pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan

dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) akan diuraikan kinerja program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Belanja APBD.

3.2.3. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam hal ini Dinas pendidikan melaksanakan Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra dan rencana kerja tahunan, adapun Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1.Mengusahakan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan.

Tujuan :

Mengusahakan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan,

<i>Sasaran</i>	
	1. Mendata kondisi sarana dan prasarana secara kualitatif dan kuantitatif
	2. Perluasan dan pemerataan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal
	3. Mendata kondisi anak usia sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat
	4. Memiliki data masyarakat yang putus sekolah, melalui UPT Dinas Kecamatan.

Pada tahun 2015-2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan Angka Putus Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI sebesar 5%, tingkat SMP/MTs sebesar 5% dan untuk tingkat SMA/MA/SMK sebesar 10%. Akan tetapi pada realisasinya, APS untuk tingkat SD/MI sebesar 3,2%, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 1,5% sedangkan untuk tingkat

SMA/MA/SMK sebesar 0,35% tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Ketidakberhasilan ini bukan berarti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami penurunan akan tetapi justru peningkatan bagi Pemerintah Daerah dalam menggalakkan pendidikan bagi masyarakat di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tahun 2015-2016, dengan memanfaatkan pendanaan dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti di SKPD Dinas Pendidikan, telah dilaksanakan 245 kegiatan dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menunjang Perluasan dan pemerataan Pendidikan di seluruh daerah dalam Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015-2016

2. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya percepatan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur formal dan non formal. 2. Paket penyelenggaraan program percepatan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun formal dan non formal. 3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat pendidikan minimal tingkat SLTP baik melalui pendidikan formal maupun informal (Paket A, B)
----------------	--

Dari jumlah kelulusan untuk semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak seluruhnya yang

melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari realisasi angka tahun 2015 melanjutkan dari tingkat SD/MI ke SMP/MTs hanya mencapai 0%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs ke tingkat SMA/MA hanya mencapai 0%. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan ekonomi bagi sebagian masyarakat sehingga mengorbankan pendidikan anak mereka untuk membantu mereka bekerja.

3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berstandar nasional (unggulan) di setiap kecamatan.

Tujuan: Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berstandar nasional (unggulan) di setiap kecamatan

Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan prioritas khusus kepada sekolah yang dapat diunggulkan 2. Menyiapkan instrument yang valid dan dapat mengukur seluruh aspek yang diperlukan. 3. Penelusuran calon siswa baru dengan test 4. Memberikan kewenangan penuh kepada sekolah.
----------------	--

Sesuai dengan dana yang dianggarkan pada APBD kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015, telah diberikan Bea Siswa untuk siswa, SMA/MA dan SMK. Dan bantuan operasional sekolah (BOMM) telah di anggarkan untuk Mempelancar program Pendidikan Menengah, Dari Dana APBN dan shering dana APBD dilakukan Penyelenggaraan lomba untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan pendidik di Kabupaten Kepulauan Meranti .

4. Mengembangkan potensi anak secara utuh sejak usia dini.

Tujuan : Mengembangkan potensi anak secara utuh sejak usia dini.

Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi anaknya melalui lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Memperluas dan mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
----------------	---

Tenaga Pendidik yang bertugas sebanyak 867 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh tingkat pendidikan mulai dari tamat SMA sederajat sampai dengan tingkat S1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti telah membuat target untuk tenaga pengajar PAUD yang tamat SMA sederajat sebanyak 192 orang, akan tetapi pada realisasi mencapai 350 orang, untuk tamatan PGTK ditargetkan sebanyak 120 orang akan tetapi pada realisasi mencapai 102 orang, tingkat pendidikan Diploma ditargetkan sebanyak 70 orang akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 85 orang, dan tingkat pendidikan S1 ditargetkan sebanyak 370 orang akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 215 orang. Tidak tercapainya realisasi sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan masih terdapat tenaga pengajar yang sudah mengikuti pendidikan perkuliahan akan tetapi masih dalam masa pendidikan sehingga data yang disampaikan merupakan data awal pada pengajuan lamaran pekerjaan dengan ijazah terakhir belum mengikuti pendidikan perkuliahan.

5. Mengupayakan Peningkatan Mutu Relevansi Pendidikan

Tujuan: Mengupayakan Peningkatan Mutu Relevansi Pendidikan

Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dorongan dan bea siswa bagi guru dan tenaga kependidikan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendataan yang akurat kebutuhan fasilitas penunjang KBM pada semua jenjang pendidikan 3. Memberikan wewenang pada sekolah untuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 4. Supervisi dan evaluasi pendidikan yang dilaksanakan secara terjadwal dan terukur
----------------	---

Untuk mengetahui tingkat kebutuhan pembangunan ruang kelas yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti diperlukan data rasio kelas terhadap jumlah murid perkelas. Target dari rasio ini sudah merupakan jumlah baku yang berpedoman kepada standar pendidikan. Untuk tingkat SD/MI rasio yang ditargetkan adalah 1:28, ini berarti untuk 1 ruang kelas berisikan siswa sebanyak 28 orang. Apabila jumlah siswa melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan maka dapat dipastikan ruang kelas tersebut kurang nyaman dikarenakan kondisi ruangan yang sempit. Rasio kelas dan jumlah murid tingkat SD/MI pada realisasinya 1 : 11. Rasio tersebut dibawah standar yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 39,28%. Untuk tingkat SMP/MTs rasio yang telah ditetapkan adalah 1 : 32, akan tetapi pada realisasinya mencapai 1 : 24 sehingga capaian kinerja mencapai 75%. Untuk tingkat SMA/MA/SMK rasio yang telah ditetapkan 1 : 32, akan tetapi pada realisasinya mencapai 1 : 25 sehingga

capaian kinerja mencapai 78,12%. Kondisi ini dibawah standar nasional tentang rasio kelas terhadap jumlah siswa, hal ini menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tidak diperlukan lagi penambahan ruang kelas baru, dikarenakan ruang kelas yang ada masih belum terisi secara maksimal.

6. Meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Tekologi (IPTEK)

Tujuan :

Meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Tekologi (IPTEK).

Sasaran	1. Memberikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menguasai IPTEK dengan menyiapkan sarana penunjang yang memadai
----------------	---

Guna meningkatkan kemampuan siswa dalam mengikuti perkembangan IPTEK sekarang ini sangat diperlukan sarana yang mendukung maksud dan tujuan tersebut. sarana yang dimaksud adalah dengan tersedianya ruang komputer yang ada dimasing-masing sekolah. Akan tetapi dengan kondisi anggaran dan beberapa pertimbangan lainnya, tidak semua sekolah memiliki ruang komputer tersebut. untuk tingkat SD/MI di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti baru 40 SD/MI yang memiliki ruang komputer tersebut, sedangkan untuk target yang hendak dicapai sebesar 50 ruang sehingga capaian kinerja hanya mencapai 80%. Untuk tingkat SMP/MTs dari target 60 ruang yang sudah memiliki ruang komputer baru 50 ruang yang tersedia atau capaian kinerja sebesar 83%. Sedangkan untuk tingkat SMA/MA fasilitas ruang komputer yang tersedia hanya 25 sekolah, sementara yang ditargetkan sebanyak 30 ruangan sehingga capaian

kinerja sebesar 83%. Dan fasilitas Labolatorium Kimia Untuk SMA/SMK yang tersedia hanya 30 sekolah, sementara yang ditargetkan sebanyak 18 ruangan sehingga capaian 54%.

7. Meningkatkan pelaksanaan manajemen pelayanan Pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tujuan :Meningkatkan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1. Sertifikasi Pendi dik	Guru	4024	1145	28.5 %

Berdasarkan rekapitulasi data guru yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 4024 orang, yang telah mendapat sertifikasi hanya 1145 orang atau sebesar 28.5%. Hal ini dikarenakan masa kerja guru dan jumlah jam mengajar masih menjadi penghambat untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi serta mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dilihat dari kondisi tersebut, jumlah guru yang memegang satu bidang study sudah melebihi dari jumlah murid dan kelas yang ada sehingga terdapat 1 bidang study yang dipegang oleh lebih dari 1 orang guru bidang study yang sama.

3.2.4. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada tahun anggaran 2015-2016, penyediaan Anggaran Tidak Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 248.020.029.741,- Dan BelanjaLangsungRp17.442.350.000.000,00,-

.3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti

Program kerja dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah harus direncanakan dan dilaksanakan secara simultan. Oleh karena itu program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016, merupakan kesinambungan dari program kerja tahun 2015, dengan mengacu pada pengembangan aspek-aspek manajemen kepegawaian Daerah.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendistribusi sumber daya Tenaga Pendidik Daerah Perbatasan yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa ada penumpukan Tenaga Pendidik dari Daerah
2. Monitoring
3. Evaluasi

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015-2016 yaitu sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin
4. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program dan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.
6. Program dan Pembinaan Aparatur
7. Program Pengembangan data/informasi
8. Program dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pernyataan diatas merupakan gambaran mengenai program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Mendistribusi Sumber Daya Tenaga

Pendidik Daerah Perbatasan di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tugasnya dengan semestinya, tetapi pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik dari program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam mendistribusi Sumber Daya Tenaga Pendidik, Dinas Pendidikan yang Mengeluarkan SK, dimana ditempatkan tenaga pendidik tersebut. Badan Kepegawaian Daerah Mengkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa ada penumpukan Tenaga Pendidik dari Daerah. Badan Kepegawaian Daerah monitoring dan evaluasi, dan Badan Kepegawaian Daerah hanya mengusulkan Dengan Dinas Pendidikan dengan dua cara yaitu: rotasi/mutasi dan pengadaan Guru baru untuk Daerah Perbatasan, dan tunjangan untuk tenaga pendidik yang mengajar daerah perbatasan. dengan demikian Tenaga Pendidik didaerah perbatasan bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Ketertarikan kolonial Bentuk hubungan perdagangan ekspor pada zaman penjajahan pada waktu kekuatan-kekuatan komersial beraliansi dengan pemerintahan.

Ketertarikan/keterbelakangan distribusi tenaga pendidik lebih kepada hubungan dinasti politik, daripada kualitas Pendidik atau bobot pendidik didaerah.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah dituntut melaksanakan wewenangannya harus berdasarkan peraturan - peraturan yang telah berlaku didaerah tersebut. Agar pemerintahan daerah berjalan dengan maju baik kesajahteraan sosial masyarakat maupun dalam mutu pendidikan yang berkualitas.

2. Saran

- a. Dinas Pendidikan dan Badan

Kepegawaian Daerah dalam menjalankan kewenangannya pada pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Pendidikan sudah berjalan dengan baik, tetapi ada kendala yang belum terealisasi dalam program atau kegiatan yang dilakukan dalam hal pendidikan seperti pemerataan Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan, dan teknologi belum terlaksana dengan efektif dan efisien.

- b. Pemerintah Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah di tuntut untuk melaksanakan kewenangannya dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas, walaupun belum terealisasi, tetapi harus ada kebijakan yang tegas untuk pemerintahan daerah di masa mendatang.
- c. Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kebijakan di tuntut agar mempunyai langkah selektif untuk kedepannya dalam hal peneyelenggaraan pendidikan, agar usaha-usaha yang dilakukan tetap teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alvin Y. So dan Suwarsono. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Cetakan keempat. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota Ikapi.
- Arief Sritua dan Sasono Adi. *Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Adi Rianto . 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit
- Budiardjo. Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Keempat. Jakarta

Djam'an Satori dan Aan Komariyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung CV Alfabeta

Efriza. 2016. *Kekuasaan Politik perkembangan Konsep, Analisis dan Krisis*. Intrans Publishing. Malang. Jatim.

Emzir. 2012. *Metode Penelitian Analisa Data*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD.

Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Giddens, Anthony. 2002. *The Third Way: Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.

Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto. 1984-1988. *kepemimpinan dan supervisi pendidikan*. cetakan 1-2. Bina Aksara, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 tentang sistem pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti pasal 3 ayat (1-2)

